

ABSTRAK

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka optimalisasi dan transparansi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta guna tercapainya penerimaan pajak daerah secara maksimal, Pemerintah Kota Tegal telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 17C Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online. Tujuan ditetapkan peraturan ini antara lain mencegah potensi kebocoran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 17C Tahun 2017 dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Tegal Nomor 17C Tahun 2017 serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa sub bab yaitu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian data- data tersebut diolah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online dalam pelaksanaannya berupa pemasangan perangkat dan/atau sistem transaksi usaha secara *online* terhadap perangkat/sistem transaksi milik wajib pajak di tempat usaha wajib pajak dimana terhubung langsung dengan perangkat yang dimiliki oleh perangkat daerah. Perangkat ini yang nantinya merekam semua data transaksi berupa pendapatan wajib pajak setiap hari. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Adapun hambatan dalam pelaksanaan peraturan ini yaitu dari segi wajib pajak dimana setelah memasang alat tersebut terkadang tidak difungsikan, dari segi sistem aplikasi milik wajib pajak adalah berbayar/milik pihak swasta dimana tidak dapat diakses oleh perangkat daerah, dan dari subrtansi pasal 13 peraturan ini yang tidak bisa diterapkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu pemeriksaan lapangan oleh perangkat daerah, pemesanan alat baru yang dapat mengakses sistem aplikasi berbayar serta mengajukan revisi peraturan walikota ini.

Kata kunci : Pajak Daerah, Otonomi Daerah, Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online